



Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Sinergi Kekuatan Politik, SDM, Dan Era Digital

Abdurojak ¹, Fajar Pandu Nugroho ², Yundi Christie Nandani ³, Rahmawati Noorilla ⁴, Nungky Nadya Madonna ⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: abdurojak251@gmail.com ¹, Fajarpandun@gmail.com ², yundi@sociopreneur.id ³, rahmawatinrla23@gmail.com ⁴, nungkymadona@gmail.com ⁵

Abstract, *Using a qualitative method based on a literature review, this study examines the relationship between political power, human capital quality, and digitalization as the primary foundations of national economic independence. Data was collected from political economy literature as well as periodic reports from reputable international organizations such as the World Bank, OECD, UNCTAD, and ILO. The findings conclude that political authorities play a crucial role in formulating stable regulations and protecting the country's vital industries. Meanwhile, human capital development serves to drive innovation and adaptation to global technology. On the other hand, the adoption of digital technology plays a role in revolutionizing production systems and improving governance. Ultimately, this study affirms that Indonesia's economic resilience, free from dependence on external parties, can only be realized if these three instruments are managed in an integrated and sustainable manner.*

Keywords: *Economic Self-Reliance, Political Power, Human Capital, Digitalization, Political Economy.*

Abstrak, *Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, riset ini mengkaji keterkaitan antara kekuatan politik, kualitas sumber daya manusia, dan digitalisasi sebagai fondasi utama kemandirian ekonomi nasional. Data dikumpulkan dari literatur ekonomi politik serta laporan berkala dari organisasi internasional bereputasi seperti [World Bank](#), OECD, UNCTAD, dan ILO. Hasil kajian menyimpulkan bahwa otoritas politik berperan krusial dalam merumuskan regulasi yang stabil dan memproteksi industri vital negara. Sementara itu, pengembangan modal manusia berfungsi memacu daya inovasi dan adaptasi teknologi global. Di sisi lain, adopsi teknologi digital berperan merevolusi sistem produksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia yang bebas dari ketergantungan pihak luar hanya bisa terwujud jika ketiga instrumen tersebut dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan.*

Kata Kunci: *Kemandirian Ekonomi, Kekuatan Politik, Modal Manusia, Digitalisasi, Ekonomi Politik.*

PENDAHULUAN

Kemandirian ekonomi merupakan agenda krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi gejolak global, ketatnya persaingan, dan masifnya digitalisasi. Pencapaian kemandirian ini sangat bergantung pada tiga elemen utama: kebijakan dari kekuatan politik, kualitas modal manusia sebagai pilar inovasi, serta transformasi digital yang merombak struktur ekonomi. Oleh karena itu, studi kualitatif berbasis riset kepustakaan ini hadir untuk mengkaji secara mendalam sinergi ketiga faktor tersebut. Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah kredibel serta laporan resmi lembaga dunia seperti World Bank, OECD, UNCTAD, dan ILO.

Kekuatan politik berperan sebagai fondasi utama yang mengarahkan pembangunan, menjamin stabilitas kebijakan, dan memproteksi sektor strategis nasional. Sementara itu, modal manusia berfungsi sebagai penggerak daya saing melalui pendidikan dan keterampilan yang memungkinkan terciptanya nilai tambah ekonomi. Di sisi lain, transformasi digital bukan sekadar alat produksi, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan sektor industri baru. Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi ini sangat terikat pada regulasi politik yang tepat serta kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni.

Walaupun studi terdahulu telah mengulas urgensi kekuatan politik (Prastyo et al., 2024), modal manusia (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2012), serta transformasi digital (Bukht & Heeks, 2018; UNCTAD, 2021), mayoritas literatur masih mengkajinya secara parsial. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menunjukkan minimnya analisis yang memadukan ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka ekonomi politik yang utuh. Padahal, di tengah masifnya pergeseran global, sinergi antara dinamika politik, kualitas SDM, dan teknologi digital menjadi kunci utama bagi sebuah negara untuk bertahan dalam persaingan internasional.

Aspek kebaruan (*novelty*) dari kajian ini bertumpu pada penggunaan sudut pandang terintegrasi dalam membedah relasi politik, pengembangan modal manusia, dan digitalisasi demi menyokong kemandirian ekonomi nasional. Pendekatan holistik ini menawarkan pemahaman yang lebih luas daripada riset-riset terdahulu yang cenderung terfragmentasi. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak sekadar menambal celah teoretis, melainkan juga memperkaya literatur ekonomi politik modern dalam memandang kemandirian ekonomi sebagai suatu sistem yang multidimensi.

Melalui penelaahan literatur yang mendalam, studi ini membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia ditentukan oleh keterpaduan yang harmonis antara keputusan politik, peningkatan kapasitas manusia, dan adopsi digital. Apabila kebijakan yang responsif, peningkatan mutu SDM, serta perluasan ekosistem digital berjalan beriringan, Indonesia berpotensi besar untuk mengoptimalkan industri dalam negeri, memenangkan kompetisi global, serta mereduksi dominasi asing. Dengan demikian, artikel ini memberikan fondasi konseptual yang strategis bagi perumusan ekonomi yang mandiri serta berorientasi jangka panjang.

KAJIAN LITERATUR

Kemandirian ekonomi nasional bagi negara berkembang kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Fenomena dinamika geopolitik, ketatnya kompetisi pasar global, serta masifnya gelombang digitalisasi menuntut negara untuk tidak lagi mengandalkan keunggulan komparatif tradisional seperti sumber daya alam. Kajian kontemporer menunjukkan perlunya pergeseran ke arah integrasi strategis antara kebijakan negara, penguasaan teknologi, dan kapasitas manusia.

Kekuatan Politik sebagai Penentu Arah Kebijakan.

Dimensi politik dipahami sebagai variabel fundamental yang mengarahkan peta jalan pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut literatur ekonomi politik klasik hingga institusionalisme baru, kestabilan politik dan kapasitas regulasi pemerintah menentukan seberapa efektif suatu negara dalam memproteksi sektor industri strategis dari guncangan eksternal.

Kebijakan proteksi yang terukur, kepastian hukum investasi, dan kemauan politik (*political will*) menjadi prasyarat mutlak sebelum inovasi lainnya dapat berjalan secara optimal.

Modal Manusia (Human Capital) sebagai Penggerak Inovasi.

Teori modal manusia yang dipelopori oleh para akademisi menekankan bahwa investasi pada sektor pendidikan, pelatihan, dan kesehatan adalah pilar produktivitas nasional. Di era modern, kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak lagi sekadar diukur dari tingkat melek huruf, melainkan kapasitas dalam melakukan adaptasi teknologi, penciptaan nilai tambah (*value-added*), serta penguasaan keterampilan tingkat tinggi (*high-order skills*).

Transformasi Digital sebagai Katalisator Struktur Ekonomi.

Teknologi digital bukan lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pendukung operasional, melainkan pengubah lanskap ekonomi secara struktural. Studi dari lembaga lintas negara seperti UNCTAD menegaskan bahwa otomatisasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis platform mampu memotong rantai distribusi yang panjang, menekan biaya transaksi, dan membuka ceruk pasar baru bagi industri domestik.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan pencarian, pengumpulan, penilaian, serta penyimpulan literatur ilmiah yang relevan. Fokus utamanya adalah membedah secara komprehensif keterkaitan antara otoritas politik, pembinaan modal manusia, dan digitalisasi dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi negara. Data pustaka mencakup buku teks ekonomi politik modern, studi modal manusia, jurnal bereputasi (*peer-reviewed*), artikel digitalisasi terkini, serta laporan berkala dari organisasi dunia seperti World Bank, OECD, UNCTAD, dan ILO.

Penyaringan sumber pustaka didasarkan pada standar ketat yang meliputi kesesuaian tema, reputasi akademis, kemutakhiran tahun terbit, dan hubungannya dengan variabel yang diteliti. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) serta penafsiran kualitatif guna memetakan korelasi teoretis, logika konseptual, dan celah riset terkait. Mengingat penelitian ini murni mengandalkan pendalaman teori dan logika berpikir tanpa melibatkan olah data statistik, hasil akhirnya bermuara pada kerangka konseptual baru bagi strategi kemandirian ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Orientasi Kebijakan Ekonomi Nasional dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Dalam tata kelola negara di Indonesia, dimensi politik memegang peran signifikan dalam memproyeksikan arah kebijakan ekonomi demi tercapainya kemandirian nasional. Negara mengemban fungsi krusial sebagai regulator dan pembuat kebijakan yang berwenang mengendalikan struktur ekonomi melalui pembentukan hukum, perlindungan industri strategis, serta tata kelola investasi modal.

Studi dari Prastyo et al. (2024) membuktikan bahwa konsistensi arah ekonomi sangat bersandar pada stabilitas politik. Ketika tensi politik meningkat, iklim investasi kerap terganggu sehingga menghambat laju industrialisasi domestik yang mandiri. Di sisi lain, Muhammad (2023) menjelaskan bahwa negara memanfaatkan otoritas politiknya untuk melakukan intervensi pasar guna memicu percepatan industri melalui pembatasan arus impor dan pemberian insentif fiskal.

Kedaulatan ekonomi pada dasarnya merupakan output dari konsolidasi politik yang kompleks antara pemerintah dan partai politik demi melepaskan ketergantungan dari hegemoni asing.

Aktor politik memanfaatkan wewenang institusionalnya untuk memprioritaskan kendali lokal atas sumber daya strategis. Hal ini tecermin dari kajian yang mengaitkan industrialisasi dengan penguatan posisi tawar negara di kancah politik lewat proteksi regulasi. Secara historis, pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengenai kedaulatan produksi, distribusi, dan konsumsi melegitimasi perlunya intervensi aktif negara agar tidak didikte oleh pasar global. Hal ini diperkuat oleh analisis Thee Kian Wie bahwa instrumen nasionalisme ekonomi telah lama digunakan demi menjaga aset produktif dari kepemilikan asing. Oleh sebab itu, ideologi, struktur kepartaian, dan sistem tata negara adalah variabel penentu lahirnya strategi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kontribusi Pengembangan Modal Manusia terhadap Peningkatan Daya Saing dan Kedaulatan Ekonomi Nasional

Pengembangan modal manusia memegang peran strategis dalam mengatrol daya saing serta kedaulatan ekonomi nasional karena menjadi pilar utama terciptanya tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika global. Sejalan dengan teori ekonomi klasik hingga modern, mutu sumber daya manusia mengontrol akselerasi pertumbuhan, peta jalan industri, serta kemampuan inovasi suatu negara guna meminimalisasi ketergantungan pada modal dan keahlian asing. Schultz (1961) serta Becker (1993) memandang modal manusia sebagai investasi jangka panjang yang mendongkrak efisiensi dan penciptaan nilai tambah. Tenaga kerja yang terdidik memicu lahirnya industri kompleks dan ekosistem riset yang kuat. Lebih lanjut, Hanushek dan Woessmann (2012) menggarisbawahi bahwa bukan durasi sekolah yang utama, melainkan mutu kognitif dan kompetensi pemecahan masalah yang menjadi indikator absolut keunggulan nasional.

Sektor modal manusia juga menjadi motor penggerak bagi pergeseran struktural dari sektor tradisional ke arah industri bernilai tinggi. Sebagaimana riset Autor, Levy, dan Murnane (2003), era digitalisasi menuntut keahlian non-rutin dan analitis yang hanya dapat dipenuhi oleh SDM unggul demi memperkuat hilirisasi rantai pasok lokal. Teori dari Romer (1990) serta Aghion dan Howitt (2006) menegaskan bahwa kemandirian teknologi hanya dicapai melalui ketersediaan periset domestik berkualitas tinggi. Selain itu, modal manusia berfungsi sebagai pembangun *absorptive capacity* kemampuan menyerap dan mengadaptasi teknologi luar. Hal ini didukung data World Bank (2020) yang menyatakan bahwa kualitas SDM yang mumpuni mampu mengubah investasi asing (FDI) menjadi transfer pengetahuan nyata bagi industri lokal, bukan sekadar memanfaatkan upah buruh murah.

Dari sudut pandang pemerataan, Todaro dan Smith (2015) mengemukakan bahwa perluasan akses pendidikan dan kesehatan akan melahirkan mobilitas sosial dan pemerataan produktivitas. Pemikiran Amartya Sen (1999) juga mendukung bahwa SDM yang berdaya akan melahirkan kohesi sosial dan stabilitas politik jangka panjang. Kesimpulannya, pengembangan modal manusia merupakan determinan mutlak bagi kedaulatan ekonomi. Tanpa penguatan kapasitas manusia, negara akan terjebak dalam pusaran dinamika global yang merugikan. Sebaliknya, investasi terukur pada sektor ini akan menjadi batu loncatan yang kuat bagi posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Dampak Transformasi Digital terhadap Restrukturisasi Ekonomi dan Kapasitas Nasional dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Digitalisasi telah menjelma sebagai penggerak utama dalam merombak tatanan ekonomi modern serta memperkuat kapasitas nasional demi meraih kedaulatan ekonomi. Pada level struktural, teknologi menggeser pola produksi dan distribusi manual ke arah ekosistem berbasis informasi dan otomatisasi. Menurut Bukht dan Heeks (2018), ekonomi digital melahirkan tatanan baru (*new digital ecosystem*) yang memicu lahirnya sektor produktif seperti *fintech* dan *e-commerce*, yang secara simultan memperluas sumber pertumbuhan nasional.

Selain itu, adopsi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan *big data* mampu menekan biaya operasional dan mempercepat inovasi mandiri. Chen (2020) berpendapat bahwa digitalisasi memungkinkan suatu negara membangun industri strategis yang berdaya saing global tanpa terus bergantung pada pihak eksternal. Di samping itu, efisiensi tata kelola publik dan pemetaan potensi daerah juga makin optimal lewat sistem berbasis data, senada dengan laporan World Bank (2020) mengenai pentingnya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dari kacamata ketenagakerjaan, Castells (2010) mengemukakan bahwa penguasaan teknologi digital menentukan posisi tawar dan kekuatan produksi suatu negara di kancah internasional. Oleh sebab itu, negara yang berhasil melahirkan talenta digital yang inovatif akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk mencapai kemandirian ekonomi. Jika dikelola secara inklusif, transformasi digital akan menjadi fondasi utama yang memutus rantai ketergantungan dari dominasi asing.

Sinergi antara Kekuatan Politik, Modal Manusia, dan Transformasi Digital dalam Mengakselerasi Kemandirian Ekonomi Indonesia

Kedaulatan ekonomi Indonesia di era modern hanya dapat diwujudkan melalui keterpaduan yang dinamis antara arah kebijakan pemerintah, mutu modal manusia, serta akselerasi adopsi teknologi. Dalam tatanan ini, dimensi politik bertindak sebagai fondasi struktural yang menetapkan arah pembangunan, alokasi investasi, dan payung hukum tata kelola digitalisasi nasional. Tanpa adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat, program digitalisasi hanya akan bergerak secara terfragmentasi dan gagal memberikan dampak ekonomi yang berkesinambungan. Bangsawan, G. (2023) menegaskan bahwa restrukturisasi digital di Indonesia adalah agenda multisektoral yang memerlukan harmonisasi lintas institusi; di mana penyatuan kebijakan, pengembangan kompetensi SDM, serta kesiapan infrastruktur menjadi syarat mutlak demi mendongkrak kapasitas ekonomi negara.

Kualitas modal manusia merupakan variabel penentu keberhasilan pemanfaatan peluang di era digital. Ekosistem digital menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki literasi teknologi, melainkan juga ketajaman analitis dan kreativitas. Walaupun kebijakan mampu menyediakan infrastruktur, manusialah yang menjadi motor penggerak transformasi tersebut. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, digitalisasi hanya akan melahirkan infrastruktur tanpa nilai ekonomi yang nyata. Sebagaimana riset Idat, D. G. (2019), penguatan SDM adalah inti dari ketahanan ekonomi digital karena teknologi menuntut perubahan paradigma produksi.

Namun, di tingkat praktis, kesenjangan kompetensi masih menjadi hambatan besar bagi UMKM, kaum muda, dan aparatur negara. Upaya pemerintah melalui program seperti *Digital Talent Scholarship* belum berjalan mulus karena terganjal isu pemerataan akses, seperti yang diungkapkan oleh Shofiyani dan Salomo (2025). Selain itu, riset Sulistiyo et al. (2023) di Maluku Utara membuktikan bahwa kapasitas institusional pemerintah dalam mengelola kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program digital. Sinergi yang harmonis di antara regulasi politik, kompetensi manusia, dan teknologi pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi bernilai tambah tinggi serta mengurangi dominasi teknologi luar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia tercipta dari hubungan simbiosis yang saling menguatkan antara otoritas politik, kualitas modal manusia, dan akselerasi transformasi digital. Dimensi politik memegang peran sentral sebagai penyedia stabilitas demi melahirkan kebijakan yang konsisten dalam mengamankan sektor industri vital serta merancang struktur ekonomi yang berdikari. Di sisi lain, peningkatan kapasitas modal manusia mutlak diperlukan guna memicu produktivitas dan memuluskan proses transfer teknologi dalam memenangkan kompetisi global. Sementara itu, disrupsi digital berperan merombak tata kelola ekonomi modern melalui otomatisasi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Keterpaduan ketiga elemen ini menjadi kunci strategis bagi penguatan pasar dalam negeri dan pemutusan rantai ketergantungan asing. Oleh karena itu, arah pembangunan nasional di masa depan wajib

memprioritaskan tata kelola regulasi yang adaptif, pembinaan manusia yang terukur, dan pemerataan teknologi agar terbentuk ekonomi yang tangguh di tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., & Howitt, P. (2006). *The Economics of Growth*. MIT Press.
- Autor, D., Levy, F., & Murnane, R. (2003). The skill content of recent technological change. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia : Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Policy for Accelerating Digital Transformation. 2, 27–40.
- Bukht, R. & Heeks, R. (2018). *Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy*. Development Informatics Working Paper Series, University of Manchester.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Chen, W. (2020). Digital Economic Transformation and National Competitiveness. *Journal of Economic Policy Studies*, 12(3), 145–168.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). Schooling, educational achievement, and economic growth. *Journal of Economic Literature*, 50(3), 607–668.
- ILO. (2020). *The Impact of Digitalization on Labour Markets in Emerging Economies*. International Labour Organization.
- Muhammad, M. (2023). Industrialisasi sebagai Kekuatan Politik Negara. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Politik*.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/view/375>
- Idat, D. G. (2019). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. 5–11.
- OECD. (2019). *OECD Skills Strategy*. OECD Publishing.
- Prastyo, D. D., Trisiana, A., Royani, M., & Agustina, P. (2024). Pengaruh Dinamika Politik dan Stabilitas Politik Terhadap Perubahan Ekonomi Global di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan*.
<https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/view/10222>
- Romer, P. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Shofiyani, A., & Salomo, R. V. (2025). Evaluasi Program Pengembangan Talenta Digital : Fresh Graduate Academy (FGA). 6(3), 1817–1830.

Sulistiyo, H., Martua, A., & dkk. (2023). GOVERNMENT PERFORMANCE PADA KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION (STUDI EMPIRIS DI PROVINSI MALUKU UTARA). Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 95-113.

Todaro, M. P., & Smith, S. (2015). Economic Development. Pearson.

UNCTAD. (2021). Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development. United Nations Conference on Trade and Development.

World Bank. (2020). Human Capital Project 2020 Update. World Bank Group.

World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank Publications.